

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM JAMKESMAS  
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

**TESIS**

Oleh:

**NORA EKA PUTRI  
0821202041**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**



# Efektivitas Penerapan Program Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang

Oleh: Nora Eka Putri

(Dibawah Bimbingan Prof.Dr.Afrizal,MA dan Drs.Syaiful,M.Si)

## Ringkasan

Dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di antara prinsip yang menjadi acuan utama keberhasilan pelaksanaan pemerintahan menurut *World Bank* adalah efektivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas Pemerintah dapat dilihat dari kualitas layanan publik. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terutama kepada warga miskin, karena jumlah warga miskin di Indonesia relatif menunjukkan angka yang cukup signifikan yaitu sekitar 40% penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatnya jumlah warga miskin di Kota Padang menjadi perhatian penting untuk melakukan pelayanan terutama pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas. Derajat kesehatan dianggap penting karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan, oleh sebab itu perlu dianalisis efektivitas program pemerintah terhadap warga miskin.

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Penerapan Program Jamkesmas Oleh Pemerintah Kota Padang dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan program tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas dan model efektivitas organisasi—model tujuan (*goals model*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program Jamkesmas oleh pemerintah Kota Padang belum efektif, karena efektivitas tersebut tidak saja dilihat dari target kuantitatif namun juga aspek kualitas pelayanan, kesiagaan, motivasi dan penilaian pihak luar. Dari aspek tersebut di atas belum sepenuhnya dapat terwujud sehingga efektivitas program Jamkesmas belum tercapai.

Dalam pelaksanaan Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang ada beberapa hal yang menjadi acuan efektivitas penerapan Jamkesmas. Di antaranya adalah pencapaian target kuota pendistribusian kartu Jamkesmas kepada warga miskin Kota Padang. Berdasarkan pencapaian target, Pemerintah Kota Padang dinilai efektif, karena berdasarkan indikator pendistribusian kartu Jamkesmas menurut buku pedoman Jamkesmas bahwa kartu Jamkesmas harus terdistribusi 100%, dalam implementasinya Pemerintah Kota Padang telah mendistribusikan 76,1% kartu Jamkesmas dari 185.001 jumlah kuota warga miskin yang mendapatkan kartu Jamkesmas.

Selanjutnya penerapan Jamkesmas juga dilihat dari aspek kualitas yang di dalamnya termasuk efektivitas kualitas pelayanan oleh Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan Jamkesmas. Kualitas pelayanan tersebut dilihat dari penyampaian informasi, pelayanan dan pendanaan Jamkesmas. Penyampaian informasi kepada warga miskin tentang kartu Jamkesmas dan mekanisme penggunaannya belum efektif karena dari hasil penelitian masih ada warga miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas dan tidak mengetahui mekanisme

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing. Menurut Rondinelli dan Cheema<sup>1</sup> wewenang yang dilimpahkan di antaranya untuk perencanaan, dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pemerintahan, sesungguhnya implikasi dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa aspek.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemerintah daerah sekaligus masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah melakukan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah. Pemberian pelayanan gratis terutama kepada warga miskin di daerah adalah salah satu jargon politik yang diusung oleh calon kepala daerah ketika kampanye Pemilu kepala daerah. Sehingga pada sebagian daerah hal tersebut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu kepala daerah. Selanjutnya implementasi dari janji politik tersebut—pelayanan gratis kepada warga miskin perlu dikaji lebih lanjut.

---

<sup>1</sup> M. Masud Said , *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UUM Press, Malang, 2005, hlm5

Sejak digulirkannya otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya termasuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud jika pemerintah peka terhadap aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu efektivitas dan responsivitas diharapkan dapat menjadi solusi guna perbaikan kesejahteraan masyarakat terutama warga miskin.

Agar wewenang yang dimiliki berimplikasi terhadap pelayanan publik dan pembangunan di daerah, pemerintah daerah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan, pembangunan dan lainnya dengan berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada semua aspek kehidupan. Terkait dengan responsivitas pemerintah daerah, persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kepekaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama warga yang berada pada golongan masyarakat kelas menengah ke bawah (warga miskin).

Dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di antara prinsip yang menjadi acuan utama keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut *World Bank*<sup>2</sup> adalah efektivitas pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat<sup>3</sup>. Lembaga-lembaga pemerintahan harus berusaha melayani setiap *stakeholders* sebagai bentuk kepedulian. Penyelenggara pemerintahan yang baik adalah yang mampu menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya

<sup>2</sup> Martin Jimung *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. 2005. Hlm. 106

<sup>3</sup> Efektivitas pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat maksudnya adalah pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk pelayanan yang tidak membutuhkan prosedur yang panjang dan mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang relative terjangkau bahkan gratis

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas penerapan Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dalam penerapan Jamkesmas.

Efektivitas penerapan Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang dalam penelitian ini merujuk pada model efektivitas "goals model". Berdasarkan indikator-indikator dalam "goals model" yang terdiri atas pencapaian target; kualitas pelayanan; kesiagaan; motivasi; penerimaan tujuan organisasi; keluwesan adaptasi dan penilaian pihak luar, bahwa penerapan Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang belum efektif.

Dari segi pencapaian target kuota kartu Jamkesmas yang sudah diterbitkan oleh PT Askes telah mencapai lebih dari sebagian kuota Jamkesmas untuk Kota Padang, namun pada aspek yang lain penerapan program Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya penyampaian informasi dan sosialisasi tentang Jamkesmas oleh Pemerintah Kota Padang, kemudian proses pendanaan Jamkesmas yang terkendala akibat regulasi yang tumpang tindih sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program tersebut. Selain itu faktor sumber daya manusia kemudian motivasi dari petugas kesehatan

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayat, syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Kuncoro, mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Jimung, martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- M, Mas ud, Said. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press
- Susanto, AB. 2004. *Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Amara Books
- Steers, richard. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga
- Tangkilisan, Hessel nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi (2002), *Coping Strategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan*. Makalah yang disampaikan pada Seminar "Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial". Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 17 Desember
- Lexy Moleong. 2006. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya